

ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ISOMORFISME INSTITUSIONAL: PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM PENEGAKAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU 2019 DI KOTA BATAM

Dhani Akbar

Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

akbardhani@umrah.ac.id

Abstrak

Penyelenggara Pemilu dalam Pilkada berperan dalam proses pengalihan kekuasaan di daerah tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/ Kota. Setiap penyelenggara pemilu harus mempunyai kredibilitas yang terpercaya dihadapan rakyat, harus bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa penyelenggara mampu mandiri, akuntabel, kredibel dan berintegritas dalam mewujudkan Pilkada berkualitas. bagaimana isu penegakan etika penyelenggara pemilu berdampak terhadap persepsi masyarakat terhadap isomorfisme institusional di wilayah Batam, Provinsi Kepulauan Riau? Penelitian ini berlokasi di 12 kecamatan terpilih di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah survei dengan metode deskriptif. Penyelenggaraan Pemilu di Kota Batam merupakan bagian dari kontestasi pemilihan kepala daerah yang juga terkait dengan isu konservatisme hingga populisme. Hal ini memiliki dampak negatif yang cukup signifikan pada persepsi masyarakat terhadap isomorfisme institusional di kota Batam.

Kata Kunci:Persepsi; Masyarakat; Isomorfis Institusional; Pemilu; Batam.

Abstract

Election organizers in Pilkada play a role in the process of transferring power at the provincial and district/city levels. Every election organizer must have credible credibility in front of the people, must be able to show the public that the organizers are capable of being independent, accountable, credible and with integrity in realizing quality elections. How does the issue of upholding the ethics of election administrators affect the public's perception of institutional isomorphism in the Batam area, Riau Islands Province? This research is located in 12 selected sub-districts in Batam City, Riau Islands Province. The method used in this research is a survey with a descriptive method. Elections in Batam City are part of the regional head election contestation which is also related to issues of conservatism to populism. This has a significant negative impact on people's perceptions of institutional isomorphism in the city of Batam.

Keywords: Perception; Society; Institutional Isomorphism; Election; Batam.

Pendahuluan

Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berperandalam proses pengalihan kekuasaan di daerahtingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.Setiap penyelenggara pemilu harus mempunyaikredibilitas yang terpercaya dihadapan rakyat,harus bisa menunjukkan kepada masyarakatbahwa penyelenggara mampu mandiri, akuntabel,kredibel dan berintegritas dalam mewujudkan Pilkada berkualitas (Rahayu, Surya, Lesmana, Etik, & Gubernur, 2020).

Persepsidideskripsikan sebagai berhubungan dengan lingkungan sebagai proses dimana individu-individu mengorganisasikan(Gregory, 1987).Kemudian, persepsi juga dapat diartikan sebagai upaya menerjemahkan serta memahami kesan yang akan terjadi (Kinicki & Kreitner (2005:208)). Dalam teori persepsi akan ada hubungan usaha yang dilakukan ketika beberapa individu-individu mengamati perilaku untuk menentukan apakah tindakan tersebut disebabkan faktor intenal atau eksternal (Kelley (1971:7)). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah pandangan individu yang menjadikannya kekuatan pendorong yang kuat untuk bertindak. Memproses informasi dan berhubungan dengan pengalaman masa lalu memungkinkan seseorang untuk membuat gambaran di mana untuk melihat yang akan terjadi melalui pengaruh sosial budaya dimana setiap individu dilengkapi dengan pengalaman kehidupan pribadi yang memengaruhi persepsi (McDonald (2012:7)).

Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaoratif (*Collaborative Governance*) menjelaskan desain kelembagaan tentang permasalahan legitimasi suatu lembaga yaitu (1) kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk berunding dengan yang lain

tentang hasil kebijakan dan (2) klaim bahwa hasil kebijakan mewakili konsensus berbasis luas. Representasi yang lemah atau tidak eksklusif oleh karena itu,mengancam melemahkan legitimasi hasil kolaborasi sehingga perlu sekiranya kita memahami bersama tentang teori kelembagaan dan bagaimana strategi untuk menguatkan kelembagaan dengan cara berkolaborasi.**Teori institusional**(*Institutional Theory*) atau **teori kelembagaannya** adalah terbentuknya organisasi oleh karena tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi(Robbins, Odendaal, & Roodt, 2003).

Penganut teori institusional meyakini bahwa keteraturan dapat dicapai melalui institusi. Teori ini mengkritisi model ekonomi neo-klasik, yang menurut hemat mereka mendiskriminasikan atau menciptakan asumsi yang tidak rasional antara nilai-nilai pasar dengan nilai-nilai sosial. Mereka menolak model rasional aktor dan curiga terhadap deduksi yang dirumuskan pada model neo-klasik karena dominannya kepentingan pribadi di dalamnya¹. Penyusunan terbaru telah menekankan bagaimana organisasi publik menjadi subjek tekanan institusional yang mendalam sehingga menyebabkan pada umumnya organisasi publik menjadi lebih mirip (Ashworth, Hirdes, & Martin, 2009) Teori institusional organisasi memprediksi bahwa organisasi akan menjadi lebih serupa karena tekanan institusional, baik dikarenakan adanya koersif (*coercive*), normatif (*normative*), dan mimetik (*mimetic*) (DiMaggio & Powell, 1983).

Hubungan keagenan sektor pemerintah tidak dapat didekati sepenuhnya dengan pendekatan keagenan konvensional, karena

beberapa pertimbangan. Pertama adanya perbedaan ideologi organisasi yang ada, ideologi organisasi yang ada di sektor publik (pemerintahan) adalah organisasi yang mana akan lebih berupaya mengutamakan sebuah kepentingan publik atau memaksimalkan kepentingan sosial. Dalam memaksimalkan pelayanan masyarakat (*public service*) diatas kepentingan lainnya. sementara itu ideologi yang terkandung dalam teori keagenan sendiri berdasarkan fakta yang ada dan terjadi terdapat unsur kapitalisme yang seiring melekat erat pada teori ini dimana paradigma yang terjadi dalam penyusunan akuntansi sikap individualis yang menepatkan *self-interest* sebagai sesuatu yang lebih dominan. *Agency problem* juga ada dalam konteks organisasi pemerintahan (Hilmi dan Martani (2012)). Prinsipal dalam sektor publik memiliki latar belakang yang berbeda-beda, oleh karena itu seharusnya pengungkapan laporan keuangan tidak hanya terbatas pada akses dan dilaporkan kepada DPRD yang berperan sebagai wakil rakyat. Hubungan prinsipal dan agen dapat dilihat dalam politik demokrasi dikarenakan Indonesia adalah sebagai Negara kesatuan dan demokratis maka pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap prinsipal yaitu masyarakat sebagai pemilih dan pemerintah pusat.

Coercive isomorphism (ketika organisasi terpaksa melakukan adopsi struktur atau aturan). *Mimetic Isomorphism* atau ketika organisasi mengkopi atau meniru organisasi lainnya, biasanya disebabkan karena adanya sebuah ketidakpastian. *Normative Isomorphism* atau ketika orang mengadopsi

berbagai bentuk karena tuntutan profesional organisasi sementara itu sendiri mengklaim bahwa mereka superior (Schacter & Daniel, 2011). Dalam penyelenggaraan Pemilu, di Kepulauan Riau pernah terjadi gugatan hasil Pemilu. Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Provinsi Kepulauan Riau, timbul karena keluarnya Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 97/BA/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Riau. akibat adanya sejumlah 52.655 (Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima) pemilih di Kota Batam oleh Sistem Data Pemilih (SIDALIH) dan diregister dengan Nomor: 01/PS/BWSL.KEPRI.10.00/X/2015 pada tanggal 16 Oktober 2015 oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (Kurniawan et al., 2016). Lantas bagaimana persepsi masyarakat terhadap isomorfisme institusional penguatan kelembagaan dalam penegakan etika penyelenggara pemilu tahun 2019 di kota Batam?

Fokus pada tulisan ini membahas persepsi masyarakat terhadap isomorfisme institusional di Kota Batam. Kota Batam, yang secara demografi mencakup setengah populasi Provinsi Kepulauan Riau, merupakan poros pergerakan perkonomian yang berdampak besar terhadap permasalahan kesejahteraan sosial, hal ini juga selaras dengan signifikansi tingkat interpretasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada.

Tabel 1
Jumlah Data Penduduk Masyarakat Kota Batam
(2014-2018)

	Tahun	Jumlah Penduduk
1	2014	1.030.428
2	2015	1.188.985
3	2016	1.236.399
4	2017	1.283.196
5	2018	1.329.773

Sumber Data: BPS Kota Batam 2014-2018

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap persepsi masyarakat pasca pemilu 2019. Dalam persepsi masyarakat banyak dilakukan mengenai indikator-indikator isomorfis institusional sebagai wujud penguatan kelembagaan dalam penegakan etika penyelenggara pemilu 2019(Wickenden, 1960).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari kegiatan penelitian mandiri dari penulis bersama tim yang berlokasi di 12 kecamatan terpilih di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah survei dengan metode deskriptif. Deskriptif penelitian dengan memfokuskan pada persepsi masyarakat dalam tingkat kepercayaan politik masyarakat di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang telah di susun oleh peneliti sehingga dilanjutkan dengan perhitungan populasi. Populasi adalah: "Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan Sampel adalah merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti atau dipandang sebagai suatu bagian terhadap populasi, namun bukan populasi itu sendiri. Adapun populasi dari keseluruhan data yang dapat diambil adalah sejumlah 1.236.399 orang dari 12 kecamatan yang tersebar di seluruh Kota Batam. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sebanyak 123 orang sebagai sampel, yang mewakili per Kecamatan dengan menggunakan *Purposive Sampling* Teknik *Purposive Sampling* adalah tidak berdasarkan random melainkan berdasarkan adanya atas pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu sehingga dilakukan atas pertimbangan yang mengikat(Arikunto, 2006).

Tabel 2
Populasi dan Sampel Masyarakat
di Kota Batam

No	Kecamatan	Penduduk Kota Batam			
		L	P	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel
1.	Belakang Padang	9.673	9.556	19.229	2
2.	Bulang	5.246	4.678	9.924	1
3.	Galang	8.412	7.311	15.723	2
4.	Sungai Beduk	37.185	49.506	86.691	9
5.	Sagulung	43.048	43.145	86.193	9
6.	Nongsa	131.131	111.224	242.355	24
7.	Batam Kota	90.564	82.915	173.479	17
8.	Sekupang	33.362	29.771	63.133	6
9.	Batu Aji	33.983	31.352	65.335	7
10	Lubuk Baja	121.954	121.998	243.952	24
11	Batu Ampar	63.757	60.408	124.165	12
12	Bengkong	53.023	53.197	106.220	10
	Total	631 338	605 061	1 236 399	123

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau (2016)

Untuk pengumpulan data, menggunakan data primer dan data sekunder(Sugiyono, 2006). Data primer diperoleh dengan cara wawancara menggunakan kuisioner serta observasi. Data sekunder diperoleh dari berbagai tulisan dan sumber-sumber data lainnya yang relevan dengan penelitian ini(Prof. Dr. Sugiyono, 2016). Analisa data digunakan pendekatan secara deskriptif kualitatif kemudian diolah dengan menggunakan aplikasi *Statistical Product and Service Solutions* dan di formulasikan sebagai berikut:

Rata-Rata Skor

$$X = \sum \frac{(\text{Skor Pertanyaan} \times \text{Frekuensi Skor})}{n}$$

Rentang Skala

$$R_s = \frac{(m - 1)}{m}$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel

m : Jumlah alternatif jawaban tiap item

menentukan rentang skala dengan rumus sebagai berikut :

$$R_s = \frac{(m - 1)}{m}$$

$$R_s = \frac{(4 - 1)}{4} = 0,6$$

Kemudian dapat dirumuskan keputusan penilaian pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Rata-Rata Interpretasi Persepsi Masyarakat

No	Rata-Rata	Interpretasi
1	1,0 – 1,6	Sangat Tidak Setuju
2	1,6 – 2,2	Tidak Setuju
3	2,2 – 2,8	Setuju
4	2,8 – 3,4	Sangat Setuju

Sumber :(Umar, 2005)

Hasil dan Pembahasan

a. Persepsi Masyarakat terhadap Isomorfisme Institusional

Semua penyelenggara pemilu harus mengedepankan nilai-nilai etika dalam melaksanakan kewenangannya. Sehingga, tidak mudah untuk diberi sanksi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), karena akan mengganggu tahapan pemilu (Chakim, 2014). Hal ini diuji melalui pola hubungan antar penyelenggara pemilu di Indonesia sebenarnya telah mengadopsi prinsip *electoral integrity*, namun terdapat catatan khusus bagi DKPP, yaitu akan lebih baik apabila dalam menjalankan wewenangnya tidak sampai *overlapping* masuk ke ranah wewenang lembaga lain, sebab *overlapping* kewenangan merupakan salah satu bentuk ketidakprofesionalan, dan ketidakprofesionalan merupakan salah satu bentuk pelanggaran etika (Nasef, 2014).

Tabel 3
Kriteria Penilaian Persepsi Responden Per Kecamatan
Terhadap Penyelenggaraan Pemilu di Kota Batam Tahun 2019

Kec	Kriteria Penilaian									
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
Belakang Padang	2.50	2.50	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.50	3.50
Bulang	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0
Galang	3.0	3.0	2.54	3.0	3.04	2.96	2.83	2.71	3.08	3.04
Sungai Beduk	2.56	3.22	2.67	2.56	2.78	3.22	2.44	2.33	3.11	3.0
Sagulung	2.50	2.50	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.50	3.50
Nongsa	3.04	3.04	2.75	2.92	3.08	2.96	2.83	2.50	3.08	3.04
Batam Kota	2.50	2.50	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.50	3.50
Sekupang	2.17	2.67	2.83	2.67	2.67	2.67	2.50	2.50	2.67	2.50
Batu Aji	2.71	2.43	2.71	2.43	2.43	3.0	2.29	2.29	3.14	2.29
Lubuk Baja	3.0	3.0	2.54	3.0	3.04	2.96	2.83	2.71	3.08	3.04
Batu Ampar	3.0	3.0	2.54	3.0	3.04	2.96	2.83	2.71	3.08	3.04
Bengkong	2.70	2.40	3.0	2.80	2.70	2.80	2.70	2.70	3.50	2.50

Sumber : Data Olahan SPSS 16.0

Pada hasil penilaian persepsi responden per kecamatan terhadap penyelenggaraan pemilu di kota Batam, pengukuran dilandasi pada *breakdown* dari institusi, kolaborasi dan pemberdayaan yang mencakup aspek *involvement* dan *embeddedness*. Keterlibatan di sini adalah interaksi antar partisipan, pengaturan kemitraan dan arus informasi bi-dimensional. Sedangkan keterlekatan mencakup interaksi pihak ketiga, penyusunan perwakilan dan informasi multidimensional.

Hasil tersebut menunjukkan perlunya peningkatan sarana dan prasarana serta koordinasi antara tiap-tiap peserta pemilu agar dapat bekerja sama menyukseskan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan fungsi instansi masing-masing (Pagaralam & , Idham, 2020) seluruh Penyelenggara Pemilu agar tetap memedomani dan mengindahkan asas-asas, prinsip-prinsip dasar, dan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar Pemilu sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Kode Etik Pemilu, serta peraturan-peraturan atau regulasi-regulasi lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu (Erwinsyahbana, 2018).

.Menakar Isomorfisme Institusional Kota Batam

Pada isu isomorfis institusional, terdapat 4 (empat) penyesuaian, yaitu penyesuaian kategorial, penyesuaian struktural, penyesuaian prosedural, dan penyesuaian personil. Pertama, penyesuaian kategorial, yang terjadi ketika aturan-aturan institusional mengarahkan organisasi membentuk struktur mereka. Konvensi-konvensi tersebut kemudian akan menghasilkan struktur yang homogen, yang kemudian menjadi semacam kamus struktur. Organisasi digabungkan dalam sebuah sistem keyakinan kognitif untuk memperbesar legitimasi. Kemudian. Penyesuaian struktural, yang disebabkan oleh peraturan pemerintah, ketidakpastian lingkungan, atau mencari legitimasi. Disamping struktur, organisasi biasanya terpengaruh untuk melakukan sesuatu dalam beberapa cara pula. Kadangkala penyesuaian atau adopsi adalah hasil dari ketidakpastian atau paksaan (*coersive*), dan pemaknaan normatif.

Pada takaran isomorfisme koersif, berdasarkan persepsi masyarakat, lembaga penyelenggara memiliki kecenderungan rawan akan pengaruh politik dan legitimasi problematika itu sendiri. Hal ini ditambahkan dari argumentasi terkait dengan kurangnya respon terhadap permasalahan *money politics* dan populisme. Kemudian, takaran isomorfisme mimetikse jalan dengan kasus sebelumnya, di mana respon terhadap keketidaktentuan masalah tidak mencapai standarisasinya. Selain itu, isomorfisme normative menyinggung terhadap aspek profesionalisme. Keterkaitan problematika isomorfisme dengan pembentukan lembaga negara independen yang terlibat dengan lembaga donor dan juga pihak luar. Namun masalah utama tetap pada penetapan posisi yang tepat dalam sistem dikotomis antar *power* dengan *checks and balances mechanism* yang sesuai dengan asas budaya konstitusional di Indonesia. Aspek institusi, kolaborasi dan pemberdayaan sejalan dengan proses homogenisasi yang secara normatif, perlu adanya interaksi antarpartisipan, kemitraan dan juga arus informasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dibuktikan dengan analisis data yang dilakukan dan telah di bahas maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut di antara lain :

1. Hasil penilaian persepsi responden per kecamatan di kota Batam mencakup aspek *involvement* dan *embeddedness*. Keterlibatan di sini adalah interaksi antar partisipan, pengaturan kemitraan dan arus informasi bi-dimensional. Sedangkan keterlekatan mencakup interaksi pihak ketiga, penyusunan perwakilan dan informasi multidimensional.
2. Hasil tersebut menunjukkan perlunya peningkatan sarana dan prasarana serta koordinasi antara penyelenggara dan peserta pemilu agar dapat bekerja sama menyukseskan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan fungsi instansi masing-masing
3. Penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil sangat diperlukan dalam membangun citra positif pesta demokrasi, diiringi dengan kontestasi pemilihan kepala daerah di balik isu-isu konservatisme hingga populisme yang ada di Indonesia semestinya tidak memberikan dampak negatif yang cukup signifikan terhadap persepsi masyarakat.
4. Penyelenggara pemilu di Indonesia memang dapat dirasakan memiliki improvisasi dan meraih kepercayaan masyarakat yang cukup baik.

b. Saran

Rekomendasi dari penelitian ini adalah :

1. Masyarakat perlu dilibatkan bersama-sama dengan pemerintah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama pihak swasta/ *Collaborative Governances* sehingga menguatnya penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.
2. Adanya pencapaian positif penyelenggara pemilu diharapkan dapat mengobati keterpurukan ekonomi di kawasan strategis perbatasan Negara, terlebih dalam bentuk fleksibilitas kebijakan.
3. Perlunya penetapan posisi yang tepat dalam sistem dikotomis antara *power* dengan *checks and balances mechanism* yang sesuai dengan asas budaya konstitusional di Indonesia

References

Sumber Buku:

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Revisi VI). Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashworth, M., Hirdes, J. P., & Martin, L. (2009). Research in Developmental Disabilities The social and recreational characteristics of adults with intellectual disability and pica living in institutions. *Elsevier: Research in Development Disabilities*, 30, 512–520. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2008.07.010>
- Donaldson, L. (1995). The Contingency Theory of Organizational Design: Challenges and Opportunities. In *Chapter 2* (pp. 19–40). Sydney: UNSW Press.
- Gregory, R. L. (1987). *Perceptions* (Psychology). New York: Routledge.
- Kelley, H. H. (1971). *Attribution in Social Interaction*. Morristwon: General Learning Press.
- Kinicki, A., & Kreitner, R. (2005). *Organizational Behavior : Concepts, Skills & Best Practices* (Fourth).
- McDonald, S. M. (2012). Perception : A Concept Analysis. *Internasional Journal Of Nursing Knowledge*, 23(1), 1–8.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta, ed.).
- Robbins, S. P., Odendaal, A., & Roodt, G. (2003). *Organizational Behavior : Global and Southern African Perspectives*. Pearson Education South Africa.
- Schacter, & Daniel. (2011). *Psychology + psychinvestigator*. New York: Worth Publisher.
- Sugiyono. (2006). Statistik untuk penelitian. In *CV ALFABETA Bandung* (Vol. 10).
- Umar, H. (2005). *Riset sumber daya manusia dalam organisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wickenden, E. (1960). Social Security And Voluntary Social Welfare. *SAGE Publications*, (August).

Sumber Jurnal:

- Chakim, M. (2014). Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 393–408.
- Erwinsyahbana, T. (2018). Pelanggaran Kode Etik Dan Sanksi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. *INA-Rxiv Papers*, (November), 6–8.
- Kurniawan, W., Tanfilia, E., Kurniawan, W., Setiawati, E., Djuned, F. F., Manalu, J. M., ... Amboro, Y. P. (2016). *Journal Of Judicial Review*. XVIII(1).
- Nasef, M. I. (2014). Studi Kritis Mengenai Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Mengawal Electoral Integrity Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(3), 378–401. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art3>
- Pagaralam, M. F. T., & Idham, S. N. (2020). ANALISIS YURIDIS PERAN DAN FUNGSI KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU DALAM PELAKSANAAN PENGAMANAN PROSES DAN TAHAPAN PEMILU 2019 (STUDI PENELITIAN DI POLDA KEPRI). 14(2), 37–55.
- Rahayu, L. R., Surya, P., Lesmana, W., Etik, K., & Gubernur, K. D. (2020). SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN Singaraja , 5 Oktober 2019 Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu Guna Mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang Berintegritas dan Bermartabat . 280–288.